

ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KAMPUNG ENGGROS KOTA JAYAPURA

Hans Z. Kaiwai¹

hanskaiwai@feb.uncen.ac.id

Vanessa Irene Mayor²

Charley M. Bisai³

Tince Rumalutur⁴

tincerumalutur@feb.uncen.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kampung Enggros Kota Jayapura. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner terkait akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta pengelolaan Dana Desa. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura. Secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura. Partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Pengelolaan Dana Desa.

PENDAHULUAN

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa atau kampung, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten. Dana ini sepenuhnya dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan maupun pemberdayaan masyarakat desa atau kampung. Dana desa yang bersumber dari APBN berdasarkan pada pasal 72 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, ayat dan pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: 1) Alokasi dasar; dan 2) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Oleh sebab itu pemerintah desa atau kampung harus benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin, yaitu: 1) Membina kehidupan masyarakat desa/kampung; 2) Membina ekonomi desa/kampung; 3) Mengkoordinasikan pembangunan desa/kampung secara partisipatif; dan 4) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana,

¹ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

² Alumni Magister Ilmu Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

⁴ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa/kampung.

Selain Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah juga mengeluarkan PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang diterima dari dana APBN dan langsung diterima oleh desa. Menurut Kementerian Desa, dana desa tersebut akan diterima sebesar 3% di tahun 2015, meningkat hingga 6% pada tahun 2016, sampai pada tahun 2017 mencapai 10% dan dana desa dapat berjumlah hingga 1 Milyar. Dana desa yang cukup besar itu menuntut aparatur desa harus dapat di pertanggungjawabkannya baik pemerintahan pusat maupun kepada masyarakat.

Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap, Dana Desa dihitung berdasar kanjumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Tingkat Kesulitan Geografis. Tujuan Dana Desa ialah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Dana Desa yang baik dengan prinsip-prinsip *Good Governance* membutuhkan Akuntabilitas, Transparansi dan partisipasi dimaksudkan agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberi kewajiban atas pengelolaan Sumber Daya Publik kepada pihak pemberi mandat (*Principle*) atau pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015:9). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi adalah penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya (Mahmudi, 2015:18).

Transparansi juga dimaksudkan adalah pemberian pelayanan publik yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan desa dan Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya (Tilaar, 2009:287).

Sebagaimana diamanatkan dalam UU desa, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pengembal amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara berinisiatif menyusun petunjuk pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi pengelolaan Keuangan Desa. Juklak Bimkom ini diharapkan berguna bagi tim perwakilan BPKP dan aparat pemerintah daerah Kabupaten/kota untuk meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tatakelola.

Dana Desa yang diberikan ini diharapkan dapat membuat desa/kampung menjadi mandiri dan sejahtera, untuk itu dana desa harus dapat dilaksanakan oleh aparatur desa/kampung bersama masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* diantaranya Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, maka aparatur desa/kampung dan masyarakat harus memiliki pemahaman atas peraturan perundangan dan ketentuan lainnya serta mampu memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kampung mempunyai sumber pendapatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, yaitu berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura, memberikan Apresiasi atas Pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros, yang di nilai berjalan baik. Namun ada pula hal negatif yaitu sebagian masyarakat yang tidak dilibatkan dalam kegiatan ini, hal ini disebabkan juga oleh kurangnya komunikasi antara pemerintah kampung dan masyarakat setempat. Pemerintah kampung enggros juga menggunakan dana desa untuk membangun jembatan mengelilingi kampung dengan panjangnya sekitar 900 meter, dimulai sejak 2018. Berdasarkan data Rencana Kerja Pemerintah Kampung Enggros tahun 2018 target Dana Desa yang diterima Kampung Enggros adalah sebesar Rp. 1,310,801,000 dengan realisasi sebesar Rp. 1,310,801,000, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang tidak berarti dengan target sebesar Rp. 1.310.601.000 namun yang terealisasi sebesar Rp. 833,450,000.

Pengelolaan Dana Desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Berdasarkan hal di atas maka, penelitian ini di berikan judul “**Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa DiKampung Enggros Kota Jayapura.**”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana perkembangan pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura?
- b. Bagaimana pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura?

Batasan Masalah

Permasalahan mengenai factor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa cukup banyak, oleh karena itu penulis hanya membatasi masalah penelitian ini terkait akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa khususnya di Kampung Enggros Kota Jayapura.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis perkembangan pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura.
- b. Mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura.

Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan di capai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbang pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan usaha dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengelolaan dana desa di Kampung Enggros Kota Jayapura.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Enggros Kota Jayapura, pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena tingkat akuntabilitas, transparansi dan partisipasi pengelolaan Dana Desa yang

dilaksanakan oleh pengelola Dana Desa dan masyarakat di wilayah Kampung Enggros Kota Jayapura perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya tata kelola yang baik.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan menggunakan angka-angka dan menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau hingga sekarang. Penelitian yang berbasis kuantitatif ini juga dilaksanakan untuk menguji teori atau dugaan sementara dalam penelitian apakah benar atau tidak (Sarmanu, 2017:2). Selain sebagai penelitian yang berbasis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*field research*), karena penelitian ini dilaksanakan di lapangan dalam lingkup kehidupan yang sebenarnya (Hasan, 2012:1). Dalam pelaksanaannya, *field research* dilaksanakan dengan menggali data dari lokasi atau lapangan penelitian, yaitu responden yang ada di Kampung Enggros Kota Jayapura.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data maupun informasi yang diperoleh langsung dari pelaku atau informan yang relevan. Dalam hal ini, peneliti melakukan studi lapangan dengan menggunakan kuesioner. Data yang diolah berasal dari pengisian kuesioner yang diisi langsung oleh responden. Responden yang dimaksud adalah masyarakat Kampung Enggros Kota Jayapura dalam hal ini penulis melakukan penelitian kepada Kepala Keluarga. Selain dengan menggunakan kuesioner, peneliti juga menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan data primer ini.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2017:57) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh dan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Berdasarkan pendapat di atas, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh objek penelitian yang terdiri dari manusia, gejala-gejala dan aktivitas yang berkaitan dengan Pokok penelitian yaitu Pemberdayaan masyarakat desa melalui dana desa serta faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat kampung Enggros Kota Jayapura dalam hal ini penulis merujuk kepada Kepala Keluarga yang berjumlah 132 Kepala Keluarga sebagai pelaku atau obyek penelitian.

2. Sampel

Penarikan sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu memilih orang yang dianggap ahli mengetahui masalah yang akan diteliti. Ukuran sampel menggunakan tabel Krejciec dengan didasarkan pada tingkat kesalahan 10% (Sugiyono, 2017:65). Dalam penelitian ini populasi yang ada lebih dari 100, oleh karena itu penulis menggunakan metode slovin untuk menentukan sampel penelitian. Menurut metode slovin pengambilan dari sampel populasi yang sudah diketahui jumlahnya dapat diambil dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian)

Menurut (Sugiyono, 2017:67) nilai kritis untuk penelitian deskriptif yang dapat diterima adalah sebesar 10% dari populasi. Ditetapkan nilai e = 10% (0,10) sehingga hasil perhitungan dengan menggunakan rumus diatas diperoleh sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{132}{1 + 132(0,10)^2}$$

$$n = \frac{132}{1 + 132(0,01)}$$

$$n = \frac{132}{2,32}$$

$$n = 56,89$$

Dari hasil perhitungan tersebut maka dapat di simpulkan jumlah sampelnya adalah 56,89 Kepala Keluarga, sehingga peneliti melakukan pembulatan menjadi 57 Kepala Keluarga.

Metode Pengumpulan Data

Metode/pengumpulan data adalah studi lapangan dan kepustakaan yang di gunakan sebagai prosedur atau cara sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan maka untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pengumpulan data primer

Untuk memperoleh data primer maka metode yang di gunakan penulis antra lain.

a. Observasi

Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantaun perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera Sugiyono (2017:85). Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura.

b. Teknik wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan informasi yang lebih *valid*. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang lebih sedikit (Sugiyono, 2017:87).

c. Metode/teknik kuisisioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang peneliti sudah pasti tahu variabel yang akan di ukur dan apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2017:89).

2. Metode pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder merupakan data yang di peroleh dari studi pustaka, dengan jalan mempelajari materi-materi buku bacaan, dokumen, artikel, majalah, Koran dan bacaan dokumen lainnya yang relevan dan materinya berkaitan dengan penelitian ini.

Metode Dan Alat Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Regresi Linier Berganda

Regresi dapat digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dirubah-rubah. Analisis regresi selain digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, juga dapat menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Persamaan umum regresi linier sederhana adalah:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Pengelolaan Dana Desa

α = Konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X = 0

β = Arah koefisien regresi yang menyatakan perubahan nilai Y apabila terjadi perubahan nilai

X. Bila (+) maka arah garis akan naik dan bila (-) maka nilai garis akan turun

X₁ = Akuntabilitas

X₂ = Transparansi

X₃ = Partisipasi

ε = Faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel Y

2. (Uji t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2015). Apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil 0,05% (5%) maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika taraf signifikan (α) < 0,05 dan hipotesis ditolak jika taraf signifikan (α) > 0,05.

Kriteria:

- Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.
- Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak

Atau

- Jika p < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima
- Jika p > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

3. Koefisien determinasi (R²)

Koefisien determinasi (*Goodness of fit*), yang dinotasikan R² merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi (R²) mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R² menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R² menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R² maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (Ghozali, 2015).

Definisi Operasional

Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoperasionalkan) *construct* menjadi variabel penelitian yang dapat dituju, kerlinger menyatakan variabel adalah konstruk (*constructs*) atau sifat yang akan di pelajari. Sehingga memungkinkan

peneliti yang lain untuk melakukan replikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang sama, atau mencoba mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan variabel yang ingin diteliti untuk itu definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Akuntabilitas (X_1)

Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dimana pemerintah dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan.

2. Transparansi (X_2)

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi tentang pengelolaan dana desa, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah.

3. Partisipasi (X_3)

Partisipasi adalah wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, mulai dari keikutsertaan dan keterlibatan pada saat melakukan perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, untuk mencapai hasil yang tepatsasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

4. Pengelolaan Dana Desa (Y)

Pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan penyelenggaraan penyediaan uang dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan (pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 21 Tahun 2001 adalah guna terwujudnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu kampung, sehingga pembangunan daerah seharusnya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat kampung. Selama ini, pembangunan kampung masih banyak bergantung dari kebijakan pemerintah melalui bantuan pembangunan dari dinas/instansi pemerintah, dimana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (*top down*). Meskipun programnya baik tetapi sering tidak ketemu dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kampung, sehingga sering kita jumpai masyarakat kurang peduli dalam mendukung program maupun memeliharanya.

Oleh sebab itu melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa atau kampung memberi kewenangan kepada desa/kampung untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah kampung memiliki sumber-sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di setiap kampung adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya.

Dengan adanya fiscal transfer ke kampung tersebut, maka pemerintah daerah tidak perlu lagi terlalu repot terlibat dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan skala kampung karena masing-masing kampung bersama warganya sudah mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Pemerintah daerah bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik skala daerah yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat bagi pembangunan jangka panjang. untuk

Secara substantif, alokasi anggaran dana dan pemberian kewenangan kepada kampung untuk mengatur dan memanfaatkan dana tersebut merupakan langkah taktis dan strategis dalam rangka

memperkuat kapasitas keuangan kampung menuju kemandirian, di mana masyarakat akan lebih leluasa berekspres mencapai kemajuan. Aspirasi masyarakat lebih terakomodir karena pengambil kebijakan berada di tengah-tengah masyarakat, bahkan mereka sendiri bagian dari pengambil keputusan. Beberapa manfaat dari alokasi dana ke kampung adalah:

1. Masyarakat di kampung akan lebih leluasa berekspres mencapai kemajuan. Aspirasi masyarakat lebih terakomodir karena pengambil kebijakan berada di tengah-tengah masyarakat, bahkan mereka sendiri bagian dari pengambil keputusan.
2. Pelaksanaan pembangunan di kampung menjadi maksimal karena realistis, dikerjakan sendiri dan mendapat dukungan swadaya dari masyarakat.
3. Kontrol langsung secara intensif dari masyarakat memungkinkan dan dapat meminimalisir bahkan meniadakan penyimpangan.

Guna mendukung implementasi pelaksanaan pembangunan di kampung, maka salah satu aspek penting adalah menginventarisir berbagai permasalahan dan potensi yang dimiliki serta dilanjutkan dengan menyusun perencanaannya. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Paradigma pembangunan yang baru telah menempatkan pendekatan perencanaan bersama masyarakat sebagai suatu kebutuhan mendasar dalam rangka proses pembangunan yang berkelanjutan.

Dana Desa (DD) yang diterima oleh Kampung Enggros Kota Jayapura tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Implementasi Dana Desa (DD) Enggros Kota Jayapura Tahun 2019

No	Penggunaan DD	Realisasi
1	Pembangunan sarana prasarana desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa	520.000.000
2	Pembentukan dan Penyertaan Modal BUMKAM	85.000.000
3	Pengadaan Perahu Nelayan 50 unit	200.000.000
4	Pelatihan badan pengurus BUMKAM	5.400.000
5	Pelatihan Penyusunan RPJMK	7.650.000
6	Pelatihan administrasi bagi RT/RW	5.000.000
7	Sosialisasi Miras dan Narkoba	5.000.000
8	Pelatihan Organisasi Bagi Karang Taruna	5.400.000
Total Dana Desa		833,450,000

Sumber: Laporan Kampung Enggros, 2020

Berdasarkan tabel di atas Dana Desa (DD) Kampung Enggros tahun 2019 digunakan untuk pembangunan sarana prasarana desa, infrastruktur dan lingkungan desa sebesar Rp. 520.000.000, pembentukan dan penyertaan modal BUMKAM sebesar Rp. 85.000.000, pengadaan perahu nelayan 50 unit sebesar Rp. 200.000.000, pelatihan badan pengurus BUMKAM sebesar Rp. 5.400.000, pelatihan penyusunan RPJMK sebesar Rp. 7.650.000, pelatihan administrasi bagi RT/RW sebesar Rp. 5.000.000, sosialisasi miras dan narkoba sebesar Rp. 5.000.000 serta biaya tak pelatihan organisasi bagi Karang Taruna sebesar Rp. 5.400.000.

a. Pendapatan Kampung Enggros Tahun 2019

Pendapatan Kampung Enggros pada tahun 2019 diperoleh sebesar Rp. 7.434.909 terdiri dari Dana Desa, bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota dan Alokasi Dana Desa. Untuk lebih jelas dapat dilihat rincian pada tabel berikut:

Tabel 2.
Pendapatan Kampung Enggros Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	
	a. Hasil Usaha	0
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong	0
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	0
2.	Pendapatan Transfer	
	a. Dana Desa	1.310.601.000
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	1.245.348.000
	c. Alokasi Dana Desa	4.878.960.000
	d. Bantuan Keuangan	0
	e. Bantuan Provinsi	0
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	0
3.	Pendapatan Lain lain	
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	0
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	0
	Jumlah	7.434.909.000

Sumber: Bagian TU Kampung Enggros, 2020

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penerimaan pendapatan di Kampung Enggros pada tahun 2019 terdiri dari Dana Desa sebesar Rp. 1.310.601.000, bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 1.245.348.000 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 4.878.960.000. dengan demikian, total keseluruhan pendapatan Kampung Enggros pada tahun 2019 sebesar Rp. Rp. 7.434.909.

b. Belanja Kampung Enggros Tahun 2019

Arah kebijakan Belanja Kampung berdasarkan pagu Indikatif adalah keuangan Kampung yang meliputi rencana Dana Kampung yang bersumber dari APBN; rencana Alokasi Dana Kampung (ADK) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten; rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; serta rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan kabupaten).

Tabel 3.
Pagu Indikatif Kampung Enggros Tahun 2019

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif		
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	0	951.793.219	0
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	805.000.000	1.336.879.944	100.000.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	0	0	0
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	28.450.000	0	6.256.234
	Total	833.450.000	2.288.673.163	106.256.234

Sumber: Bagian TU Kampung Enggros, 2020

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pagu indikatif Kampung Enggros tahun 2019 yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung menggunakan alokasi dana desa

sebesar Rp. 951.793.219, pelaksanaan pembangunan desa menggunakan dana desa sebesar Rp. 805.000.000, alokasi dana desa sebesar Rp. 1.336.879.944 dan dana bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 100.000.000. dana yang digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa sebesar Rp. 28.450.000 dan dana bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 6.256.234.

Karakteristik Responden

Untuk melihat karakteristik responden dalam penelitian ini, penulis menjabarkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Table 4.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase %
1	Laki-laki	36	63,15
2	Perempuan	21	36,85
Total		57	100

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin sebanyak 36 orang (63,15%) sedangkan responden yang berjenis kelamin sebanyak 21 orang (36,85%).

Table 5.
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 tahun	9	15,78
2	31-40 tahun	12	21,05
3	41-50 tahun	21	36,84
4	> 50 tahun	15	26,33
Total		57	100

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 9 orang (15,78%), responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 12 orang (21,05%), responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 21 orang (36,84%) serta responden yang berusia > 50 tahun sebanyak 15 orang (26,33%).

Table 6.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase %
1	Sarjana S1	4	7,01
2	Diploma III	3	5,26
3	SMA	20	35,08
4	SMP	15	26,31
5	SD	9	15,78
6	Tidak Sekolah	6	10,56
Total		57	100

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden yang berpendidikan Sarjana S1 sebanyak 4 orang (7,01%), responden yang berpendidikan Diploma III sebanyak 3 orang (5,26%), responden yang berpendidikan SMA sebanyak 20 orang (35,08%), responden yang berpendidikan SMP sebanyak 15 orang (26,31%), responden yang berpendidikan SD sebanyak 9 orang (15,78%) serta responden yang tidak sekolah sebanyak 6 orang (10,56%).

Table 7.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase %
1	PNS	10	17,54
2	Wiraswasta	8	14,03
3	Petani	6	10,52
4	Nelayan	20	35,08
5	Ibu Rumah Tangga	13	22,83
Total		57	100

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 10 orang (17,54%), responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 8 orang (14,03%), responden yang bekerja sebagai petani sebanyak 6 orang (10,52%), responden yang bekerja sebagai nelayan sebanyak 20 orang (35,08%) serta responden yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 13 orang (22,83%).

Analisis Data

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur data yang didapat dari masing-masing variabel setelah penelitian dan merupakan data yang valid dengan alat ukur yang digunakan (kuesioner). Adapun ketentuan yang digunakan untuk mengukur uji validitas adalah:

- a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir pertanyaan tersebut valid
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid

Penyebaran kuesioner diberikan kepada 57 orang responden, dengan nilai r_{tabel} berdasarkan ketentuan $df = \text{jumlah responden} = 57$ orang dengan tingkat signifikan sebesar 5%, angka yang diperoleh sebesar $= 0,256$.

Tabel 8.
Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X₁)

Variabel	No. Item Pernyataan	r_{hitung}	Sig	Keterangan
Akuntabilitas (X ₁)	1	0,841	0,000	Valid
	2	0,500	0,000	Valid
	3	0,742	0,000	Valid
	4	0,736	0,000	Valid

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5.8 menunjukkan bahwa seluruh pernyataan valid, karena nilai korelasi lebih dari 0,256 dan signifikansi $< 0,05$, dengan demikian seluruh pernyataan dapat dipergunakan dalam penelitian.

Tabel 9.
Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi (X₂)

Variabel	No. Item Pernyataan	r_{hitung}	sig	Keterangan
Transparansi (X ₂)	1	0,841	0,000	Valid
	2	0,856	0,000	Valid
	3	0,715	0,000	Valid
	4	0,761	0,000	Valid
	5	0,676	0,000	Valid
	6	0,749	0,000	Valid

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5.9 menunjukkan bahwa seluruh pernyataan valid, karena nilai korelasi lebih dari 0,256 dan signifikansi $< 0,05$, dengan demikian seluruh pernyataan dapat dipergunakan dalam penelitian.

Tabel 10.
Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi (X₃)

Variabel	No. Item Pernyataan	r _{hitung}	sig	Keterangan
Partisipasi (X ₃)	1	0,650	0,000	Valid
	2	0,868	0,000	Valid
	3	0,695	0,000	Valid
	4	0,726	0,000	Valid
	5	0,823	0,000	Valid
	6	0,780	0,000	Valid

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5.10 menunjukkan bahwa seluruh pernyataan valid, katena nilai korelasi lebih dari 0,256 dan signifikansi $< 0,05$, dengan demikian seluruh pernyataan dapat dipergunakan dalam penelitian.

Tabel 11.
Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Dana Desa (Y)

Variabel	No. Item Pernyataan	r _{hitung}	sig	Keterangan
Pengelolaan Dana Desa (Y)	1	0,682	0,000	Valid
	2	0,883	0,000	Valid
	3	0,742	0,000	Valid
	4	0,706	0,002	Valid
	5	0,689	0,000	Valid

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5.11 menunjukkan bahwa seluruh pernyataan valid, katena nilai korelasi lebih dari 0,256 dan signifikansi $< 0,05$, dengan demikian seluruh pernyataan dapat dipergunakan dalam penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas, semua item yang valid dimasukkan sedangkan yang tidak valid, tidak dimasukkan dalam uji reliabilitas. Karena dalam uji validitas di atas semua item valid, maka dimasukkan ke dalam uji reliabilitas.

Untuk menentukan suatu instrumen reliabel atau tidak, maka bisa menggunakan batas nilai Alpha 0,6. Menurut Ghozali (2015:187), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Dari output hasil pengolahan data/uji reliabilitas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 12.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0,781	Reliabel
Transparansi (X2)	0,792	Reliabel
Partisipasi (X3)	0,790	Reliabel
Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,790	Reliabel

Sumber: data diolah, 2020

Nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel akuntabilitas sebesar 0,781, karena nilai lebih dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian telah reliabel. Nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel transparansi sebesar 0,792, karena nilai lebih dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian telah reliabel. Nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel partisipasi sebesar 0,790, karena nilai lebih dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian telah reliabel. Nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel pengelolaan Dana Desa sebesar 0,790, karena nilai lebih dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian telah reliabel.

3. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur garis regresi atau secara verbal mengukur proporsi total varians Y yang dijelaskan oleh regresi. Sebelum mengukur koefisien determinasi terlebih dahulu harus menghitung koefisien korelasi (R). Penghitungan koefisien korelasi pada penelitian ini disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13.
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.956 ^a	.914	.909	.91263	1.812

Sumber: data diolah, 2020

- a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas
- b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa koefisien determinasi antara variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan pengelolaan Dana Desa sebesar 0,909. Artinya terdapat hubungan yang cukup erat antara variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan pengelolaan Dana Desa. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi mampu menjelaskan pengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura sebesar 90,6%, sedangkan sisanya sebesar 9,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. Uji t

Uji hipotesis secara persial dengan uji t bertujuan untuk mengetahui dari masing-masing variabel bebas X terhadap variabel terikat y. Pengujian dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} perhitungan nilai t_{hitung} dilakukan dengan menggunakan *Software SPSS 21 of Windows*. Hasil t_{hitung} disajikan dalam tabel 5.14.

Tabel 14.
Coefficientas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.377	1.044		2.276	.027
Akuntabilitas	.548	.096	.393	5.698	.000
Transparansi	.089	.036	.110	2.453	.017
Partisipasi	.471	.057	.559	8.309	.000

Sumber : Data diolah, 2020

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan tabel 14 diatas maka dapat dibentuk persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi mampu menjelaskan pengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura sebagai berikut:

$$Y = 2.377 + 0.548X_1 + 0.089X_2 + 0.471X_3 + e$$

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan t_{hitung} untuk akuntabilitas sebesar 5,698. Besarnya t_{hitung} untuk perencanaan sebesar 5,698 > dari t_{tabel} 1,672 dengan angka signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura.

Pengujian secara parsial menunjukkan t_{hitung} untuk transparansi sebesar 2,453. Besarnya t_{hitung} untuk transparansi sebesar 2,453 > dari t_{tabel} 1,672 dengan angka signifikansi sebesar $0,017 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura.

Pengujian secara parsial menunjukkan t_{hitung} untuk partisipasi sebesar 8,309. Besarnya t_{hitung} untuk pertanggungjawaban sebesar 8,309 > dari t_{tabel} 1,672 dengan angka signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura.

5. Uji Anova (Uji F)

Uji F statistik dikenal dengan Uji serentak atau Uji model/Uji Anova yaitu uji yang digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat dan untuk menguji apakah model regresi yang ada signifikan atau tidak signifikan.

Tabel 15.
ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	468.910	3	156.303	187.664	.000 ^a
	Residual	44.143	53	.833		
	Total	513.053	56			

Sumber: data diolah, 2020

- a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas
- b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian F hitung diperoleh nilai sebesar 187,664 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa, nilai F hitung yang diperoleh signifikan, sedangkan F hitung 187,664 > F tabel 0,833, hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti akuntabilitas, transparansi dan partisipasi mampu menjelaskan pengaruh yang positif signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura.

Pembahasan

1. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Enggros Kota Jayapura

Hasil penelitian secara serempak dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura. Hasil penelitian dalam hal akuntabilitas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan kampung kepada pemerintah di atasnya dan kepada masyarakat yang membuktikan bahwa pertanggungjawaban pemerintah kampung untuk menyajikan dan melaporkan realisasi dana desa penting dilakukan dalam upaya meningkatkan pengelolaan yang baik. Terkait keterbukaan pemerintah kampung baik dari perencanaan hingga pelaporan dilakukan dengan terbuka untuk memelihara hubungan positif antara pemerintah kampung dan masyarakat untuk menciptakan pengelolaan yang baik, keterbukaan informasi akan membuat masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah kampung dalam melakukan pengelolaan dana desa. Dalam hal keterlibatan masyarakat dimulai proses pengelolaan baik perencanaan hingga pelaporan, keterlibatan masyarakat diharapkan akan memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa, keterlibatan masyarakat juga akan membuat masyarakat aktif dalam kegiatan desa.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kampung telah memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya, pemerintah juga telah transparan terhadap informasi keuangan meskipun masih banyak yang harus dibenahi dan ditingkatkan. Pemerintah juga telah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan meskipun masih sangat sedikit kontribusi dari masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rika Ardiyanti (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Enggros Kota Jayapura

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Enggros Kota Jayapura. Hal ini menunjukkan bahwa jika dua variabel lain tetap, peningkatan 1% pada variabel akuntabilitas akan menyebabkan peningkatan terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Enggros Kota Jayapura sebesar 0.548%.

Pengelolaan dana desa yang baik adalah pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan dimulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dalam hasil penelitian ini juga diharapkan kepada

pemerintah desa akan mematuhi prosedur dan hukum yang berlaku dalam pengelolaan keuangan. Kepatuhan pemerintah desa terhadap prosedur dan hukum akan mendorong terciptanya pengelolaan yang terhindar dari pemborosan dan korupsi. Kinerja pemerintah desa dapat dilihat dari kepatuhan pemerintah desa kepada masyarakat melalui pembuatan laporan realisasi dana desa yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pemerintah desa menetapkan program-program berdasarkan pertimbangan efektivitas penggunaan anggaran. Pengalokasian anggaran pemerintah juga harus mengikuti prosedur yang berlaku. Kinerja pemerintah desa dalam menyusun program-program dana desa telah dilakukan dengan baik hal itu didukung dengan jawaban responden yang menjawab setuju pada indikator akuntabilitas manajerial.

Selain itu, pemerintah desa telah mengutamakan kepentingan publik dalam menentukan program dana desa, pemerintah desa juga telah memperhitungkan biaya dan manfaat dalam penentuan program. Hal itu juga ditunjukkan oleh masyarakat desa yang menyatakan telah merasakan manfaat dari program penggunaan dana desa, hal itu didukung dengan jawaban responden yang menyatakan setuju pada setiap pertanyaan dalam indikator akuntabilitas program. Terkait akuntabilitas kebijakan menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa telah mampu dipertanggungjawabkan, baik pemerintah pusat maupun kepada masyarakat, hal itu disampaikan oleh pemerintah desa telah dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Weny Ultrafiah (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa.

3. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Enggros Kota Jayapura

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Enggros Kota Jayapura. Hal ini menunjukkan bahwa jika dua variabel lain tetap, peningkatan 1% pada variabel transparansi akan menyebabkan peningkatan Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Enggros Kota Jayapura sebesar 0.089%.

Transparansi merupakan salah satu hal yang penting dalam pengelolaan keuangan yang baik. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah mempunyai wewenang dalam penentuan keputusan penting, dimana keputusan tersebut juga mempunyai dampak bagi orang banyak. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah kampung juga harus menyediakan informasi yang lengkap menyangkut segala hal yang telah dikerjakannya. Hasil penelitian mengenai transparansi atau keterbukaan pemerintah desa ini ditunjukkan oleh pemerintah kampung dengan mengajak masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG). Dalam pelaksanaan transparansi ini pemerintah juga menyediakan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan keuangan maupun non keuangan yang ditempel di papan pengumuman desa maupun di papan baleho atau spanduk. Pemerintah juga selalu terbuka dan tidak pernah menutup diri dalam penyediaan informasi mengenai pengelolaan keuangan kampung maupun informasi lain, karena pemerintah kampung telah sadar secara penuh bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui tentang informasi keuangan kampung.

Dengan adanya keterbukaan informasi dan juga pelibatan masyarakat dalam musyawarah kampung, maka program pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Hal tersebut didukung dengan adanya usulan atau ide yang disampaikan oleh masyarakat. Sehingga usulan dari masyarakat tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah kampung dalam bentuk program. Dimana program tersebut dibiayai oleh dana desa. Hasil dari penelitian dalam variabel transparansi ini mendukung penelitian yang dilakukan Rika Ardiyanti (2019) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Desa.

4. Pengaruh Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Enggros Kota Jayapura

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura. Hal ini menunjukkan bahwa jika dua variabel lain tetap, peningkatan 1% pada variabel partisipasi akan menyebabkan peningkatan Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Enggros Kota Jayapura sebesar 0.471%. Partisipasi masyarakat juga merupakan hal yang penting dilakukan, mengingat tujuan dari adanya dana desa ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga, partisipasi masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mempersiapkan masyarakat agar lebih mandiri.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara langsung terhadap pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa akan mendorong hubungan yang positif antara masyarakat desa dan pemerintah desa, karena dengan adanya hal tersebut akan menjadikan pemerintah desa lebih sering berinteraksi dengan masyarakat. Bentuk dari upaya partisipasi masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa ini seperti dikutsertakannya masyarakat dalam perencanaan desa, diikutsertakannya masyarakat dalam sosialisasi maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh desa, diikutsertakannya masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian desa, serta gotong royong, dan sebagainya. Oleh karena itu, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa ini dapat ditingkatkan lagi agar pemberdayaan masyarakat dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat dapat segera terwujud. Hasil penelitian di atas juga sejalan dan menguatkan penelitian yang telah dilakukan Weny Ultafiah (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Target Dana Desa (DD) Kampung Enggros tahun 2019 sebesar Rp. 1.310.601.000 dengan realisasi sebesar Rp. 833,450,000 dengan rincian penggunaan pembangunan sarana prasarana desa, infrastruktur dan lingkungan desa sebesar Rp. 520.000.000, pembentukan dan penyertaan modal BUMKAM sebesar Rp. 85.000.000, pengadaan perahu nelayan 50 unit sebesar Rp. 200.000.000, pelatihan badan pengurus BUMKAM sebesar Rp. 5.400.000, pelatihan penyusunan RPJMK sebesar Rp. 7.650.000, pelatihan administrasi bagi RT/RW sebesar Rp. 5.000.000, sosialisasi miras dan narkoba sebesar Rp. 5.000.000 serta biaya tak pelatihan organisasi bagi Karang Taruna sebesar Rp. 5.400.000.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura. Artinya bahwa, pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Enggros yang mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi akan meningkatkan pengelolaan dana desa yang dikelola guna pelaksanaan pembangunan kampung.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah kampung Enggros secara baik, diharapkan dapat memberikan kemajuan yang berarti bagi pembangunan kampung khususnya bidang pemberdayaan aparat kampung, pembangunan fasilitas kampung serta bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Pemerintah kampung Enggros Kota Jayapura dapat mempertanggungjawabkan laporan penggunaan dana desa, memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi keuangan desa serta melibatkan masyarakat dalam menyusun program pembangunan secara lengkap, relevan dan tepat waktu kepada masyarakat agar pengelolaan dana desa yang diberikan dapat dilaksanakan secara

akuntabel, transparan dan mengutamakan musyawarah dengan masyarakat kampung dalam penyusunan program pembangunan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi maupun informasi kepada peneliti selanjutnya guna pengembangan penelitian terkait akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2015. Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Jilid 1. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN: Yogyakarta;
- Abdul Hamid. 2010. Panduan Penulisan Skripsi. Cetakan kesatu. FEIS UIN Press: Jakarta;
- Antonia, Klara; Astuti, Puji; Iek, Mesak. (2019). Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Jaifuri Di Distrik Skanto Kabupaten Keerom. Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume VI No. 3, Desember 2019;
- Eko, Sutoro. Dkk. 2016. Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa). Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia;
- Ghozali, Imam. 2015. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro;
- Hasan, Iqbal. 2012. Pokok-Pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif). Jakarta: Bumi Aksara;
- Hasibuan, Malayu S.P, 2014, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi, Bumi Aksara: Jakarta;
- Krina, Loina Lalolo. 2011. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta;
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN;
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2016 Tentang Dana Desa;
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 49 tahun 2016. Tentang Penyaluran Dana Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 168 Tahun 2014 Tentang Dana Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa;
- Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Richard, Patty; Setiawan, Agus; Urip Transna P; Quelyoe, Flora, Y. de. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume VI No. 2, Agustus 2019;
- Rika Ardiyanti. 2019. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Risya Umami. 2017. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal: Ilmu Ekonomi dan Bisnis;
- Sanggrangbano, Agustina; Maniagasi, Vivi; Iek, Mesak. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Yoka. Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume VI No. 2, Agustus 2019;

- Sarmanu. 2017. Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika, Surabaya: Airlangga University Press;
- Siswandi. 2013. Pengaruh Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, Serta Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Skripsi. Universitas Negeri Medan;
- Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press;
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta, CV;
- Sumaryadi, I. Nyoman., 2010. Sosiologi Pemerintahan. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor;
- Tilaar. H. A. R. 2009. Kekuasaan Dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusara Kekuasaan. Jakarta: Rineka Cipta;
- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Urip, Transna, P; Setiawan, Agus; Patty, Richard. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume VI No. 2, Agustus 2019;
- Waluyo, 2009. Manajemen Publik, Bandung: Mandar Maju;
- Weny Ultafiah. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palembang.